

**SKRIPSI**

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN  
ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2006-2020**

**ABISALI YASIR FATIH JUMAN RIADY**

**A11115010**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**SKRIPSI**

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN  
ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2006-2020**

Sebagai salah satu persyaratan untuk  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**ABISALI YASIR FATIH JUMAN RIADY**

**A11115010**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**SKRIPSI**

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR  
TAHUN 2006-2020**

Disusun dan diajukan oleh:

**ABISALI YASIR FATIH JUMAN RIADY  
A11115010**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 17 Januari 2022

Pembimbing I



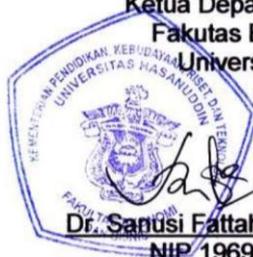
Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®  
NIP.19690413 199403 1 003

Pembimbing II



Dr. Madris, SE., DPS., M.Si., CWM®  
NIP. 19601231 198811 1 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®  
NIP.19690413 199403 1 003

## SKRIPSI

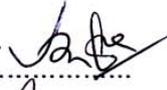
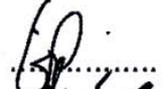
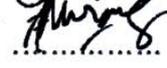
### FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2006-2020

Disusun dan diajukan oleh:

**ABISALI YASIR FATIH JUMAN RIADY  
A11115010**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal 31 Januari 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®	Ketua	1. 
2.	Dr. Madris, SE., DPS., M.Si., CWM®	Sekretaris	2. 
3.	Prof. Dr. Rahmatia, SE., MA.	Anggota	3. 
4.	Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si., CWM®	Anggota	4. 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



**Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®**  
NIP. 19690413 199403 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : **Abisali Yasir Fatih Juman Riady**  
Nomor Pokok : **A11115010**  
Program Studi : **Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis UNHAS**  
Jenjang : **Sarjana (S1)**

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2006-2020** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak Cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 31 Januari 2022

Yang Menyatakan,

A 10,000 Indonesian Rupiah banknote is shown, partially obscured by a handwritten signature in black ink. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA' and 'DITRUSMI BANK INDONESIA'. The serial number '50082AJX063000003' is visible at the bottom left of the note.

**Abisali Yasir Fatih Juman Riady**  
**A11115010**

## **PRAKATA**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang menjadi tumpuan segala harapan yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan nikmat kesehatan serta keselamatan. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih-Nya, Rasulullah SAW, figur teladan umat manusia sepanjang masa.

Skripsi dengan judul “Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar Tahun 2006-2020” disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. Dalam proses penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, serta saran dan kritik dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

- 1) Kedua orang tua penulis, Dr.H.Asriady Sulaiman, S.Ip.,M.si dan Hj. Asnaeny Rauf, S.Pd., M.Si serta saudara penulis Fatin Yasmin Megawangi Riady dan Ghaisan Khalifatul Insani Riady. Terima kasih atas segala pengorbanan yang tak terhingga dan segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga menghaturkan permohonan maaf karena menjalani studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang terlampau lama.
- 2) Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, S.E., M.Si, CIPM, CWM®, CRA., CRP. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si., AK., CA., CRP., CRA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dan Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA., CWM® selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

- 3) Bapak Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM® selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin dan Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, S.E, M.Si., CWM® selaku Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- 4) Ibu Prof .Dr. Hj. Rahmatia, SE., MA. selaku penasehat akademik penulis. Terima kasih atas segala nasehat, saran serta motivasi yang diberikan kepada penulis selama menjalani studi dan dapat meyakinkan penulis untuk bertahan di jurusan Ilmu Ekonomi.
- 5) Bapak Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM® selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Madris, SE., DPS., M.Si CWM® selaku dosen pembimbing II. Terima kasih telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan serta saran kepada penulis.
- 6) Ibu Prof .Dr. Hj. Rahmatia, SE., MA. dan Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, S.E, M.Si., CWM® selaku dosen penguji. Terima kasih telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan saran, perbaikan serta kritik yang membangun kepada penulis demi kelayakan skripsi ini.
- 7) Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, nasehat serta inspirasi kepada penulis selama menjalani studi di Universitas Hasanuddin.
- 8) Seluruh Pegawai Departemen Ilmu Ekonomi, Akademik, Kemahasiswaan, dan Perpustakaan *e-library* Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama masa studi penulis.
- 9) Teman-teman ANTARES Departemen Ilmu Ekonomi Unhas Angkatan 2015. Terima kasih atas segala bantuan dan kebersamaannya. Penulis menyampaikan permohonan maaf tidak dapat menuliskan satu persatu nama individu demi menghindari kecemburuan yang mungkin hadir.
- 10) Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi (HIMAJIE FEB-UH). Terima kasih karena telah berkenan menjadi salah satu ruang belajar bagi penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas. Tak lupa terima kasih kepada teman-teman Pengurus HIMAJIE FEB-UH Periode 2017-2018 serta seluruh pihak yang senantiasa memberikan kritik dan saran.

11) Para TIM SUKSES ( Andi Zavira Ardhia Azzahra Nasir, ST.; Bayu Nandar Trihatmojo; Chaidir Slamet Amirullah dan Dewi Murtika Sari) yang menemani penulis selama ini. Terima kasih atas kesediaan, pengertian dan pengorbanannya yang begitu besar. Penulis juga menghaturkan permohonan maaf sedalam-dalamnya kepada beliau atas segala kesalahan yang pernah dilakukan.

12) Seluruh teman, kerabat, guru, dosen serta seluruh pihak yang ikut andil berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari predikat sempurna. Oleh karenanya dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya kritik serta saran yang membangun dari para pembaca yang budiman.

Makassar, 31 Januari 2022

**Abisali Yasir Fatih Juman Riady**

## **ABSTRAK**

### **FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2006-2020**

Abisali Yasir Fatih Juman Riady

Sanusi Fattah

Madris

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Belanja Modal, dan Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari hasil pencatatan yang sistematis berupa data time series selama 15 tahun yaitu dari tahun 2006 sampai tahun 2020 yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Makassar, Jumlah penduduk memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Makassar, Belanja modal memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Makassar, dan Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Makassar.

Kata Kunci : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Belanja Modal, Investasi, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **ABSTRACT**

### **FACTORS AFFECTING REGIONAL ORIGINAL INCOME IN MAKASSAR CITY, 2006-2020**

*This study aims to determine the effect of Gross Regional Domestic Product (GRDP), Total Population, Capital Expenditure, and Investment on Regional Original Income (PAD) Makassar City. This study uses secondary data from systematic recording results in the form of time series data for 15 years, from 2006 to 2020 obtained from the Office of Investment and One Stop Integrated Services, Regional Revenue Service, Regional Financial and Asset Management Agency, Central Statistics Agency. (BPS) Makassar City. The data analysis method used is descriptive analysis and multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the Gross Regional Domestic Product (GRDP) has a negative and insignificant effect on Makassar City Original Revenue, the number of residents has a positive and significant influence on Makassar City's Original Regional Income, Capital Expenditures have a positive and insignificant effect on Regional Original Income. Makassar City, and Investment has a positive and significant impact on Makassar City's Regional Original Income.*

*Keywords : Gross Regional Domestic Product (GRDP), Total Population, Capital Expenditures, Investments, Regional Original Income (PAD).*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA .....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Otonomi Daerah .....	9
2.1.2 Konsep Pendapatan Asli Daerah.....	13
2.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PAD .....	20
2.2 Penelitian Terdahulu .....	30
2.3 Kerangka Pikir .....	35
2.4 Hipotesis .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
3.1 Ruang Lingkup Penelitian .....	37
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	37

3.4 Variabel Penelitian .....	38
3.5 Metode Analisis Data .....	38
3.5.1 Analisis Deskriptif .....	38
3.5.2 Metode Regresi Berganda .....	39
3.6 Definisi Operasional Variabel.....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
4.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Makassar .....	42
4.2 Penyajian Data .....	43
4.2.1 Produk Domestik Regional Bruto .....	44
4.2.2 Jumlah Penduduk .....	45
4.2.3 Belanja Modal .....	46
4.2.4 Investasi .....	47
4.2.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	48
4.3 Hasil Estimasi Penelitian .....	49
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian .....	51
4.4.1 Analisis Pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	52
4.4.2 Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	52
4.4.3 Analisis Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	53
4.4.4 Analisis Pengaruh Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
5.1 Kesimpulan .....	56
5.2 Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.2 PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah).....	4
Tabel 4.1 Luas Wilayah Per Kecamatan Kota Makassar.....	43
Tabel 4.2 Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Makassar .....	44
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Wilayah Kota Makassar .....	45
Tabel 4.4 Data Belanja Modal Kota Makassar.....	46
Tabel 4.5 Realisasi Investasi di Kota Makassar tahun 2006-2020.....	47
Tabel 4.6 Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar tahun 2006-2020 .....	48
Tabel 4.7 Kontribusi Pajak dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2016-2020 .....	49
Tabel 4.8 Rekapitulasi Data Hasil Regresi Linear Berganda.....	50

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	35
---------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Rekapitulasi Data

Lampiran 2: Hasil Olah Data

Lampiran 3: Biodata

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Pada prinsipnya semakin besar kontribusi PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, baik dalam bentuk dana alokasi umum (*block grant*) maupun dana alokasi khusus (*specific grant*). Sebaliknya semakin rendah kontribusi PAD dalam APBD maka semakin besar ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, sehingga peran pemerintah pusat dalam mengalokasikan anggaran ke daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah cenderung dominan. Otonomi daerah membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi tidak demikian dengan daerah yang miskin sumber daya alamnya, yang merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten/kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri (PAD), sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya (Azis, 1997).

Dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut. Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD yang menjadi sumber dana dari daerah itu sendiri. Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat

diandalkan. Kemandirian PAD bagi daerah akan memberikan dampak positif terhadap kemandirian daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam APBD.

Wujud dari pembangunan daerah di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya Otonomi Daerah yang dijalankan melalui prinsip desentralisasi, yaitu pemerintah daerah diberi kebebasan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 yang dimaksud otonomi daerah adalah otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan otonomi daerah adalah keseluruhan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, seperti rencana, perizinan, dan pelaksanaan, kecuali kewenangan di bidang pertahanan, keamanan, peradilan, politik luar negeri, kebijakan moneter/fiskal dan agama serta kewenangan lainnya yang di atur oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi. Penyelenggaraan otonomi daerah tingkat provinsi meliputi kewenangan-kewenangan lintas kabupaten/kota serta kewenangan di bidang pemerintahan lainnya (Suparmoko, 2000 dalam Kusri, 2015).

Kota Makassar sebagai daerah otonom, mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan otonomi daerah. Prinsip dasar pemberian otonomi dimaksud berdasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan pada akhirnya akan lebih memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun perolehan data Efektifitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar selama lima tahun terakhir dari 2016 sampai dengan tahun

2020, yaitu pada tahun 2016 PAD Kota Makassar sebesar Rp 971.859.753.606 dengan persentase pencapaian 75,57%. Kemudian tahun 2017 PAD Kota Makassar sebesar Rp 1.337.231.094.232 meningkat 90,06% dari tahun sebelumnya. Kemudian tahun 2018 PAD Kota Makassar sebesar Rp 1.185.453.010.990 dimana persentase pencapaian mengalami penurunan sebesar 78,85% dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2019 PAD Kota Makassar sebesar Rp 1.303.316.324.000 dimana persentase pencapaian meningkat sebesar 79,04% dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2020 PAD Kota Makassar sebesar Rp 1.749.402.916.000 dengan persentase pencapaian sebesar 100,02%. Terlihat bahwa PAD di Kota Makassar secara umum dari tahun ke tahun mengalami perkembangan secara fluktuatif. Hal ini tidak terlepas dari peranan beberapa faktor yang ikut menentukan naik dan turunnya nilai penerimaan PAD.

Potensi ekonomi suatu wilayah dapat diamati dari beberapa indikator ekonomi makro, yaitu PDRB dan jumlah penduduk. Salah satu indikator makro yang digunakan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dapat menjelaskan kemampuan daerah dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimilikinya, sehingga nilai besaran PDRB di setiap daerah berbeda-beda disesuaikan dengan potensi yang terdapat di daerah itu. Dalam mengukur pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah, dapat dihitung oleh besaran PDRB yang berkaitan dengan peningkatan produksi barang maupun jasa sehingga dapat mengetahui bagaimana kondisi ekonomi disuatu daerah tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Tabel 1.2 PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

NO	Kategori/Subkategori	2016	2017	2018	2019	2020*
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	497.706,1	505.587,8	504.691,8	525.999,9	508.925,2
2	Pertambangan dan Penggalian	841,7	766,2	659,1	576,3	0,0
3	Industri Pengolahan	19.558.171,4	20.806.595,5	20.856.675,2	22.728.078,2	21.767.900,1
4	Pengadaan Listrik dan Gas	42.286,8	45.001,5	49.359,1	53.873,3	51.516,0
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	201.330,9	215.192,4	228.605,8	224.810,9	236.015,7
6	Konstruksi	15.585.749,0	16.897.850,7	18.397.670,5	20.034.234,2	20.232.795,6
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18.271.241,3	20.112.433,3	22.484.333,7	25.142.389,6	23.777.629,4
8	Transportasi dan Pergudangan	2.312.601,5	2.516.610,1	2.737.517,9	2.995.636,7	2.476.090,8
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.184.961,7	2.375.280,6	2.682.317,2	2.849.880,0	2.284.794,4
10	Informasi dan komunikasi	11.081.117,2	12.168.289,2	13.735.373,8	14.916.416,9	16.487.162,8
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.520.289,3	5.841.805,5	6.152.597,0	6.366.608,0	6.482.785,2
12	Real Estate	3.418.456,4	3.497.115,1	3.648.893,6	3.835.372,8	3.838.843,7
13	Jasa Perusahaan	1.009.674,0	1.094.116,0	1.205.393,0	1.354.928,9	1.200.576,1
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	2.840.632,2	3.003.995,5	3.500.853,4	3.770.957,2	3.754.745,8
15	Jasa Pendidikan	8.596.482,6	9.442.548,4	10.434.496,3	11.120.165,7	11.302.838,0
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.464.252,8	2.707.721,0	3.001.174,5	3.285.553,5	3.680.339,3
17	Jasa lainnya	2.371.843,0	2.595.246,9	2.947.802,7	3.260.346,9	2.822.793,9
	<b>PDRB</b>	<b>95.957.638,0</b>	<b>103.826.155,9</b>	<b>112.568.414,9</b>	<b>122.465.829,1</b>	<b>120.905.752,0</b>

Sumber : BPS Kota Makassar Tahun 2021 Data Sementara

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan tiga sektor yang mempunyai kontribusi besar terhadap PDRB yaitu sektor konstruksi, sektor informasi dan komunikasi dan sektor jasa pendidikan. Ketiga sektor tersebut menghasilkan nilai tambah paling besar dibandingkan 14 lapangan usaha lain, maka prioritas kebijakan tahun 2022 harus diarahkan untuk menjaga agar sektor-sektor tersebut dapat bertahan ditengah guncangan pandemic Covid-19. Jika nilai tambah ketiga sektor tersebut turun signifikan, maka pertumbuhan ekonomi Kota Makassar akan melambat dan akibatnya juga akan dirasakan oleh Provinsi Sulawesi Selatan karena sebagian dari kegiatan ekonominya bertumpu di Kota Makassar. Tiga sektor yang nilai tambahnya paling tinggi perlu mendapat penanganan tepat karena struktur ekonomi Kota Makassar tergantung dari sentimen terhadap sektor-sektor ini. Artinya, ditengah situasi ketidakpastian ekonomi akibat pandemi, sektor lain boleh saja melemah tapi ketiga sektor ini harus dipertahankan.

Fenomena semacam ini umum terjadi di daerah yang berciri perkotaan di Indonesia, dimana pergeseran struktur ekonomi bergerak dari sektor pertanian (primer) ke sektor jasa (tersier) dan perekonomiannya di dominasi oleh sektor jasa. Fenomena semacam ini lazim disebut "*dutch disease*", yaitu suatu kondisi dimana booming komoditas (akibat eksploitasi sumber daya alam) akan menyebabkan aliran modal dari pendapatan komoditas meningkat, dan pada gilirannya akan mengakibatkan permintaan yang lebih tinggi untuk barang yang tidak diperdagangkan seperti jasa (restoran, hotel, dll.) dan konstruksi. Akibatnya, sektor industri kurang berkembang jika dibandingkan sektor jasa terhadap perekonomian Kota Makassar dan lambatnya pertumbuhan sektor industri menegaskan gejala ini.

PAD juga berkaitan dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk adalah satu indikator penting dalam suatu negara. Para ahli ekonomi klasik yang dipelopori Adam Smith bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan (Makdalena F Asmuruf, 2015). Namun disisi lain, jumlah penduduk yang terus bertambah juga dapat memperluas jarak pendapatan daerah masing-masing Kabupaten/Kota. Pada akhirnya hal ini berdampak pada kesenjangan pembangunan masing-masing daerah karena daerah dengan jumlah penduduk paling banyak akan mengalami pembangunan paling cepat.

Belanja modal pada umumnya di alokasikan untuk perolehan aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dengan berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah

dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan.

Salah satu faktor yang diduga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Investasi dianggap sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Dengan meningkatkan investasi, pemerintah daerah dapat mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki yang dapat menarik investor dalam menanam modal di daerah tersebut. Sehingga dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam akan meningkatkan PAD. Untuk dapat mengetahui terjadinya peningkatan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah bisa dijadikan sebagai tolak ukur karena PAD ini merupakan komponen yang penting.

Keberhasilan pembangunan perekonomian pemerintahan suatu daerah dapat dilihat dengan mengidentifikasi perkembangan kinerjanya dari tahun ke tahun. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisa rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2004: 148). Hasil dari analisis rasio tersebut dapat menunjukkan tingkat kinerja Pemerintah Daerah dan diharapkan dapat dijadikan suatu acuan untuk meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2006-2020”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Apakah PDRB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar pada tahun 2006 - 2020?
2. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar pada tahun 2006 - 2020?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar pada tahun 2006 - 2020?
4. Apakah Investasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar pada tahun 2006 - 2020?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar pada tahun 2006 - 2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar pada tahun 2006 - 2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar pada tahun 2006 - 2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar pada tahun 2006 - 2020.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademis, hasil penelitian ini diharapkan akan menambah bahan referensi atau acuan bagi studi tentang PDRB, Jumlah Penduduk, Belanja Modal, dan Investasi atau penelitian dengan objek yang sejenis.
2. Bagi Instansi Terkait, dalam hal ini adalah pemerintah Kota Makassar, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pembangunan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Otonomi Daerah**

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian prinsip dasar otonomi daerah berdasarkan undang-undang tersebut adalah mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan desentralisasi dengan adanya kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan adanya pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian otonomi daerah adalah wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Kebijakan desentralisasi yang diwujudkan dalam pembentukan daerah otonom dan penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya tujuan otonomi daerah menurut penjelasan Undang-Undang No 32 tahun 2004, pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas-asas sebagai berikut:

- 1) Asas Desentralisasi: Penyerahan wewenang oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Asas Dekonsentrasi: Pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau kepala instansi vertikal di wilayah tertentu untuk mengurus urusan pemerintahan.
- 3) Asas Tugas Pembantuan: Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan desa serta dari pemerintah kabupaten/kota ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu disertai pendanaan dan dalam hal tertentu disertai sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

Dalam pandangan lain, pada prinsip otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemberian wewenang kepada daerah yang lebih luas

sangat tepat karena daerah adalah yang lebih mengerti tentang kondisinya sendiri. Pembangunan yang dilaksanakan akan sesuai dengan prioritas daerah dan aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya partisipasi masyarakat dalam aktifitas politik ditingkat daerah serta sistem demokratisasi yang dijalankan sesuai dengan tujuan otonomi itu sendiri. (Prastijo: 2001).

Prinsip-prinsip otonomi daerah yang dianut dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, yaitu: (1) Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi keanekaragaman daerah; (2) Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab; (3) Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas; (4) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah; (5) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otoritas, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata dan semacamnya, berlaku ketentuan peraturan daerah otonom; (6) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran dan penyelenggaraan pemerintah daerah; dan (7) Pelaksanaan tugas pembantuan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga pemerintah

daerah pada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

Keuangan pusat dan daerah yang berlaku sebelumnya membawa dampak pada relatif kecilnya sumbangan PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selama ini, pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1974 mengakibatkan kurang mampu membantu daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Hal ini disebabkan UU No. 5 Tahun 1974 cenderung bersifat sentralistik dan membatasi berbagai kewenangan daerah yang penting.

Pelaksanaan otonomi daerah pada hakikatnya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan hakikat otonomi daerah tersebut yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kemampuan/kemandirian daerah (Yuliati, 2001: 22).

Selain itu otonomi daerah lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat

(lebih bersifat kerakyatan) dari pada kepentingan Pemerintah Daerah. Dalam arti bahwa kewenangan-kewenangan Pemerintah Daerah tersebut sebagai alat dan fasilitator untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, menyebarkan aspirasi dan kepentingan rakyat, memberikan fasilitas kepada rakyat melalui peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah kabupaten dan daerah kota tidak lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran atas penyelenggaraan otonomi daerah.

Pelaksanaan dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya di pemerintah daerah dan daerah kepada desa yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

### **2.1.2 Konsep Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan pasal 157 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri perlu diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktifitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata,

komponen tersebut berasal hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Keempat komponen PAD tersebut juga merupakan sumber-sumber keuangan daerah. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber keuangan daerah. Sumber-sumber PAD merupakan bagian keuangan daerah yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.

Pengeritan PAD menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Atep Adya Barata, yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah (PEMDA) yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam arti luas pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah. (Barata, 2004: 90).

Definisi lain tentang PAD adalah suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah (Sutrisno: 2000). Dan menurut Widjaja pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah (2002: 110).

Dari beberapa pendapat diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa PAD adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya

pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 yaitu:

#### 1. Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang berurutan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memberikan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak Daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-undang No. 28 Tahun 2009, yaitu: 1)Pajak hotel; 2)Pajak restoran; 3)Pajak hiburan; 4)Pajak reklame; 5)Pajak penerangan jalan; 6)Pajak mineral bukan logam dan batuan; 7)Pajak parkir; 8)Pajak air tanah; 9)Pajak sarang burung walet; 10)Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; dan 11)Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

#### 2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Diana (2016:645) hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat

yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

Ciri-ciri pokok retribusi daerah, yaitu:

- a) Retribusi dipungut oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah;
- b) Terdapat jasa balik atau kontra prestasi langsung yang dapat ditunjuk;
- c) Retribusi dikenakan kepada siapa saja baik orang pribadi maupun badan yang merasakan atau memperoleh manfaat yang disediakan oleh daerah.

Jenis-jenis Retribusi Daerah:

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Adapun yang termasuk dalam jenis-jenis jasa usaha adalah sebagai berikut: 1)Retibusi pelayanan kesehatan; 2)Retribusi pelayanan pasar; 3)Retribusi pengujian kendaraan bermotor; 4)Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; 5)Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan; 6)Retribusi KTP dan Akte Capil; 7)Retibusi pelayanan tera/ tera ulang; 8)Retribusi pelayanan pendidikan; 9)Retribusi pengendalian lalu-lintas; 10)Retribusi penggantian biaya cetak peta; 11)Retribusi pengelolaan limbah cair; 12)Retribusi pemakaman / pengabuan mayat; 13)Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; 14)Retribusi penyedotan kakus; dan 15)Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

## 2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut: 1)Retribusi pemakaian kekayaan daerah; 2)Retribusi tempat pelelehan; 3)Retribusi terminal; 4)Retribusi pelayanan kepelabuhan; 5)Retribusi penyeberangan di air; 6)Retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa; 7)Retribusi tempat rekreasi dan olahraga; 8)Retribusi pasar grosir/ pertokoan; 9)Retribusi rumah potong hewan; 10)Retribusi tempat khusus parkir; dan 11)Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

## 3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut: 1) Retribusi izin trayek; 2) Retribusi izin gangguan; 3) Retribusi izin usaha perikanan; 4) Retribusi izin mendirikan bangunan; 5) Retribusi izin penjualan minuman beralkohol; 6)Retribusi perpanjangan IMTA.

## 3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah

dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah satu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

Untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan rumah tangga daerah yang relatif cukup besar maka kepada daerah juga diberikan sumber sumber pendapatan berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004. Pengelolaan kekayaan daerah tersebut berasal dari perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Undang-Undang yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Perusahaan daerah dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu: Pertama; perusahaan asli daerah yaitu perusahaan daerah yang didirikan oleh daerah itu sendiri. Dan kedua; perusahaan daerah yang berasal dari pemerintah atassannya. Perusahaan daerah sebagaimana dimaksud, pada dasarnya dibentuk dalam rangka turut serta dalam melaksanakan pembangunan, dengan mengutamakan pembangunan daerah dengan memberikan jasa kepada masyarakat dan memberikan dukungan bagi ekonomi daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

#### 4. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, selanjutnya disebutkan dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, bahwa lain-lain PAD yang sah meliputi: Pertama; hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Kedua; jasa giro, Ketiga; pendapatan bunga, Keempat; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan Kelima; komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/jasa oleh daerah. Dari kelima komponen Lain-Lain PAD yang Sah antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan asset daerah.

Jenis-jenis Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari, yaitu 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 2) Jasa giro; 3) Pendapatan bunga; 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; 5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; 6) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 8) Pendapatan denda pajak, 9) Pendapatan denda retribusi; 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 11) Pendapatan dari pengembalian; 12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum; 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan 14) Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.

Sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang sah adalah dinas-dinas daerah serta pendapatan-pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh pemerintah daerah. Penerimaan lain-lain sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mencakup berbagai jenis

penrimaan dari hasil penjualan alat-alat dan bahan sisa, penerimaan dari sewa, bunga pinjaman bank dan giro, dan penerimaan denda yang dipikul kontraktor.

### **2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

#### **A. Produk Domestik Regional Bruto**

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pembangunan regional adalah Produk Domestik Regional Bruto, dalam hal ini bertambahnya produksi barang dan jasa dalam Produk Domestik Regional Bruto. Nilai yang tercantum dalam Produk Domestik Regional Bruto tersebut mencerminkan taraf hidup dan tingkat perkembangan ekonomi masyarakat. Dalam perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperlukan suatu pendekatan yang lebih realistis. Akan tetapi selama ini tetap mengacu pada model perhitungan secara nasional, yakni Produk Domestik Bruto (PDB) yang mana dalam perhitungan riilnya didefinisi oleh Boediono dalam Tarigan (2005, h.19), yaitu pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita. Di sini jelas ada sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi output totalnya dan sisi jumlah penduduknya. Jadi proses kenaikan output total dibagi dengan jumlah penduduknya. Output perkapita adalah total dibagi dengan jumlah penduduknya. Jadi prosesnya kenaikan output perkapita tidak bisa tidak harus dianalisa dengan melihat apa yang terjadi dengan output total di satu pihak dan jumlah penduduk di lain pihak. Suatu teori ekonomi yang lengkap haruslah bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan jumlah penduduk.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas harga berlaku maupun atas harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir

yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Tarigan (2005, h.23) Untuk menghitung angka-angka dalam PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan yaitu :

1. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu : (1) Sektor Pertanian; (2) Sektor Pertambangan dan Pengalihan; (3) Sektor Industri Pengolahan; (4) Sektor Listrik, Gas, Dan Sektor Air Bersih; (5) Sektor Bangunan; (6) Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran; (7) Sektor Angkutan Dan Komunikasi; (8) Sektor Keuangan, Persewaan, Dan Jasa Perusahaan; (9) Sektor Jasa-Jasa.

2. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari : (1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba; (2) Konsumsi pemerintah; (3) Pembentukan modal domestik bruto; (4) Perubahan Stok dan; (5) Ekspor Neto (merupakan ekspor dikurangi impor).

3. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah barang dan jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud

adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

Penyajian PDRB dibedakan dalam dua bentuk yakni PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha dikelompokkan dalam 9 sektor ekonomi sesuai dengan International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) sebagai berikut: 1) Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; 2) Sektor Pertambangan dan Pengalihan; 3) Sektor Industri Pengolahan; 4) Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih; 5) Sektor Konstruksi; 6) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; 7) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; 8) Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan; 9) Jasa-Jasa.

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama, jadi jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. (BPS 2011, 10 ).

## **B. Pengaruh PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan dan struktur ekonomi dari suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi yang mana akan menjadi sebuah indikator yang dapat menentukan arah dari pembangunan. Pertumbuhan ekonomi ini digambarkan oleh adanya Produk Domestik Regional Bruto. Dalam PDRB sendiri ini didalamnya juga terdiri dari data-data yang berkaitan dengan pendapatan regional yang telah didapat dari setiap sektor atau unit ekonomi. Sehingga PDRB erat kaitannya dengan pendapatan suatu daerah. PDRB merupakan faktor PAD, dengan meningkatkan PDRB akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak daerah. dengan demikian akan adanya pertambahan penerimaan pemerintah yang akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, kemudian dapat meningkatkan produktifitas masyarakat.

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula permintaan barang dan jasa. Hal ini mengakibatkan semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pajak dan retribusi yang ditarik pemerintah daerah. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

## **C. Jumlah Penduduk**

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 menyatakan bahwa, penduduk adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang bertempat tinggal di Indonesia. Jumlah penduduk merupakan faktor penentu adanya disparitas pendapatan antar daerah. Penambahan penduduk merupakan

suatu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat merangsang pembangunan ekonomi (Jaya dan Widanta, 2014).

Jumlah penduduk adalah sejumlah orang yang sah mendiami suatu daerah atau negara serta mentaati ketentuan-ketentuan daerah atau negara tersebut. Besarnya Pendapatan Asli Daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang ditarik juga akan meningkat. Penduduk merupakan sumber daya utama yang berpengaruh besar terhadap pembangunan di suatu wilayah (Simanjuntak, 2011).

Adam Smith berpendapat bahwa dengan didukung bukti empiris bahwa pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar, baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkatkan pendapatan khususnya pendapatan asli daerah (F. Makdalena, 2015).

#### **D. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Di negara sedang berkembang yang mengalami ledakan jumlah penduduk termasuk Indonesia akan selalu mengkaitkan antara kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Akan tetapi hubungan antara keduanya tergantung pada sifat dan masalah kependudukan yang dihadapi oleh setiap negara, dengan

demikian tiap negara atau daerah akan mempunyai masalah kependudukan yang khas dan potensi serta tantangan yang khas pula. ( Wirosardjon, 1998 ).

Menurut Malthus, pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan. Namun penambahan penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding. Jika tingkat akumulasi modal meningkat, permintaan atas tenaga kerja juga meningkat, kondisi demikian mendorong pertumbuhan penduduk. Akan tetapi, pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan hanya bila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif.

Besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga akan meningkat. Artinya semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk maka semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang diterima. Oleh karena itu akan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat, dan akan diikuti oleh peningkatan produksi sehingga akan mengakibatkan adanya perluasan dan pendirian usaha baru pada sektor produksi. Pendirian dari sektor produksi akan meningkatkan peluang terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sehingga apabila banyak masyarakat yang bekerja maka pendapatan masyarakat akan meningkat dan juga meningkatkan pendapatan daerah.

#### **E. Belanja Modal**

Menurut PP. No 24 tahun 2005 yang telah diubah menjadi PP. No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja adalah semua pengeluaran dan rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pengklasifikasian belanja daerah berdasarkan Permendagri No 21

tahun 2011 tentang pedoman Pengeluaran Keuangan Daerah dibagi:

1. Klasifikasi Belanja menurut Fungsi. Belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.
2. Klasifikasi Belanja menurut Urusan Pemerintah. Klasifikasi Belanja Urusan Pemerintah terdiri dari belanja wajib dan belanja urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja menurut urusan pemilihan terdiri dari bidang pertanian, kebutuhan energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.
3. Klasifikasi Belanja menurut Organisasi. Klasifikasi Belanja menurut Organisasi, yaitu klasifikasi berdasarkan unit pengelolaan anggaran.

Menurut Halim (2004), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Munir (2003) dalam Darwanto (2007) juga menyatakan menyatakan hal sama, bahwa belanja modal memiliki karakteristik spesifik menunjukkan adanya berbagai

pertimbangan dalam pengalokasiannya.

Belanja Modal adalah pembiayaan atau pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode, serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk dijual. Belanja Modal diakui dalam periode berjalan pada saat aset yang dibeli telah diterima dan hak kepemilikannya telah berpindah. Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap.

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya Erlina, dkk (2008:158).

Suatu belanja modal dapat dikategorikan sebagai belanja modal apabila:

1. Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemerintah daerah,
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah, dan
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Halim dan Abdullah (2006), alokasi belanja modal yang didasarkan pada kebutuhan memiliki arti bahwa tidak semua satuan kerja atau unit organisasi di pemerintahan daerah melakukan pengadaan aset tetap. Pelaksanaan pengadaan dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja, ada satuan kerja yang menyediakan sarana dan prasarana fisik seperti fasilitas pendidikan (gedung sekolah, peralatan laboratorium, perpustakaan), jalan raya, dan jembatan, sementara satuan kerja lain ada yang hanya memberikan pelayanan jasa langsung berupa pelayanan administrasi (catatan sipil, pembuatan kartu identitas kependudukan), pengamanan, pemberdayaan dan pelayanan kesehatan.

Agar alokasi dari dana belanja modal yang dimiliki suatu daerah dapat tepat sasaran dan tujuan utama dari belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah bisa tercapai, maka perlu adanya sistem pengawasan yang baik. Sistem pengawasan atau kontrol harus diterapkan dalam rangka untuk meminimalisir anggaran belanja modal yang bocor sehingga merugikan keuangan daerah.

Indikator Belanja Modal Hanifatius Samhah (2018) Indikator variabel belanja modal diukur dengan: 1) Belanja Tanah, 2) Belanja Peralatan dan Mesin, 3) Belanja Gedung dan Bangunan, 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan 5) Belanja Aset Tetap lainnya.

#### **F. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Belanja modal menjadi salah satu indikator dalam mensejahterakan masyarakatnya melalui sarana dan prasarana yang memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari secara aman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut.

Suatu daerah untuk menambah aset tetap daerahnya yang dapat berupa pembangunan infrastruktur sebagai sarana untuk pelayanan publik. Maka pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal

dalam anggaran pendapatan belanja daerahnya. Sehingga pemerintah daerah dapat melakukan pemungutan yang bersifat retribusi dan pajak atas infrastruktur yang telah dibangun untuk pelayan publik tersebut sebagai upaya dalam meningkatkan PAD.

### **G. Investasi**

Menurut Machmud dalam buku Perekonomian Indonesia (2016), Peraturan Perundang-undangan tentang Investasi telah diberlakukan sejak tahun 1967, dimana peraturan tersebut memisahkan dua peraturan investasi, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kemudian kedua undang-undang tersebut diperbaharui menjadi Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan PP. No.1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah, Pasal 9 dinyatakan bahwa ruang lingkup pengelolaan investasi meliputi perencanaan; pelaksanaan investasi; penatausahaan dan pertanggungjawaban investasi; pengawasan; dan divestasi.

Teori Neo-Klasik menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dianggap sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Semakin cepat perkembangan investasi dibanding laju pertumbuhan penduduk, maka semakin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung

mengakibatkan kapasitas produksi per tenaga kerja semakin tinggi. Tokoh Neo-Klasik, Sollow dan Swan memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Arsyad,2010).

#### **H. Pengaruh Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dalam meningkatkan pembangunan tentu pemerintah daerah tidak hanya memanfaatkan pada pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat, tetapi juga harus memikirkan cara lain melalui pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki agar menarik pengusaha agar berinvestasi di daerah tersebut (Ririn, Prihatni, dan Murdayanti, 2014).

Semakin banyak investasi atau penanaman modal yang dilakukan, maka semakin banyak pula bisnis-bisnis baru bermunculan. Hal ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan kemampuan masyarakat terhadap daya beli meningkat, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kemampuan keuangan suatu daerah.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ririn, Prihatni, dan Murdayanti (2014) dalam meningkatkan investasi sebagai modal pembangunan daerahnya, pemerintah daerah dapat mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki yang dapat menarik investor dalam menanam modal di daerah tersebut. Sehingga dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam akan meningkatkan PAD.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Kajian penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut pendapatan asli daerah. Ini disadari untuk

melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pembandingan dalam penelitian, untuk itu pada bagian ini akan diberikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian ini :

Penelitian yang dilakukan oleh Caesar Muslim, Syahrir Mallongi, dan Zainuddin Rahman (2019) menulis tentang “Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Tingkat Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kendari. Jumlah pengamatan dalam penelitian adalah 6 tahun. Data penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan variabel PDRB, berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari. Jumlah penduduk berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari. Inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari tahun 2012-2017.

Penelitian yang dilakukan oleh Hernawati (2019) menulis tentang “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah, dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui pengaruh PDRB terhadap PAD di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, (2) Mengetahui Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PAD di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, (3) Mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, (4) Mengetahui faktor yang berpengaruh dominan

terhadap PAD di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel PDRB, Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Secara parsial PDRB berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Rizhali, Syarifah Hidayah, Rahmad Budi Suharto (2018) menulis tentang “Pengaruh produk domestik regional bruto dan jumlah penduduk serta inflasi terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk, serta Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Timur. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel eksogen (X) yaitu Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk serta Inflasi dan variabel endogen (Y), yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder tahun 2006-2015. Alat analisis yang digunakan model struktur dengan dua langkah dan dianalisis menggunakan *software SPSS (statistical package for service solution)* versi 23. Dari hasil analisis diperoleh bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi tidak

berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Pendapatan Asli Daerah berkontribusi sebesar 46.693, pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Pendapatan Asli Daerah berkontribusi sebesar -65.507, pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Pendapatan Asli Daerah berkontribusi sebesar -0.439.

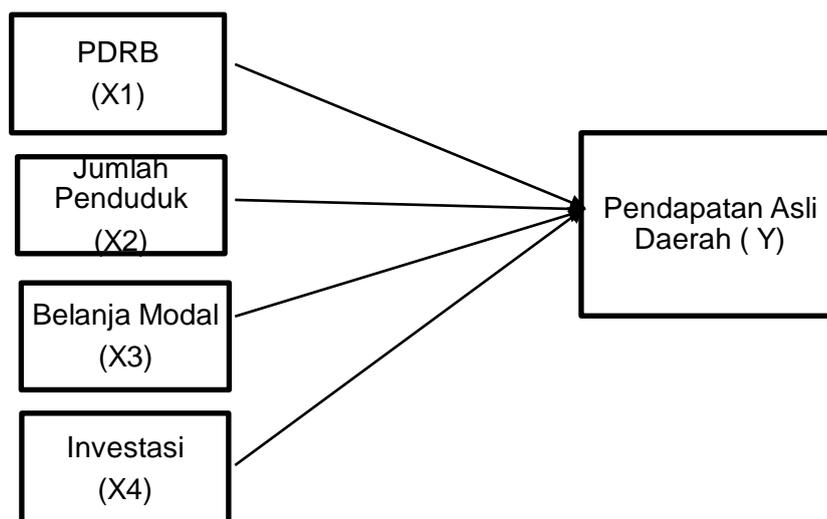
Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Gina Sukma Antari, Ida Bagus Panji Sedana (2018) menulis tentang “Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variable eksogen (X) yaitu pendapatan asli daerah dan belanja modal. (Y), yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder tahun 2011-2015. Alat analisis yang digunakan model struktur dengan dua langkah dan dianalisis menggunakan *software* SPSS (*statistical package for service solution*) versi 22. Dari hasil analisis diperoleh Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali dan Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Penelitian yang dilakukan oleh Ifrizal, Dr. Darwanis, dan Dr. Sulaiman (2014) menulis tentang “Pengaruh Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Serta dan Dampaknya Pada Kemampuan Daerah Membiayai Belanja Pegawai”. Penelitian

ini bertujuan untuk: (1) Menguji pengaruh investasi secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. (2) Menguji pengaruh investasi dan Pendapatan Asli Daerah baik secara simultan maupun parsial terhadap kemampuan daerah membiayai belanja pegawai pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Investasi berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. 2) Investasi dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap kemampuan daerah membiayai belanja pegawai pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

### 2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka pikir akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian, yaitu antara variabel bebas dengan variabel terikat (Erlina, 2011:33). Berdasarkan landasan teori dan kajian terhadap penelitian terdahulu, maka disusun kerangka pemikiran teori mengenai penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran teori dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

## 2.4 Hipotesis

Berangkat dari permasalahan yang telah dirumuskan dan tujuan yang hendak dicapai serta berlandaskan pada teori-teori yang tersedia dalam penelitian ini, berikut akan dikemukakan hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan. Adapun hipotesis penelitian ini adalah :

- 1) Diduga PDRB berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar.
- 2) Diduga Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar
- 3) Diduga Belanja Modal berpengaruh terhadap positif pendapatan asli daerah Kota Makassar.
- 4) Diduga Investasi berpengaruh terhadap positif pendapatan asli daerah Kota Makassar.